L A K I P

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sukamulya No.6 Telp./Fax. (0232) 875905 Cigugur Kuningan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024. LAKIP tahun 2024 ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur sekaligus bahan pertimbangan untuk meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan selalu berharap ada perubahan yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Berbagai upaya telah ditempuh di sepanjang tahun 2024 untuk mencapai cita-cita tersebut. Hal tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan yang bertujuan memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kuningan.

Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini menyajikan hasil penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Visi Kabupaten Kuningan yaitu Kuningan MAJU Berbasis Desa Tahun 2024. LAKIP ini juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan untuk kebaikan oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta masyarakat Kabupaten Kuningan.

Kuningan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

U.KUSMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4

C. Struktur Organisasi 5

D. Kaitan Disdikbud dengan Visi Misi Kabupaten Kuningan 9

E. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

A. Rencana Strategis 11

B. Perjanjian Kinerja 17

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) 20

D. Program dan Kegiatan Tahun 2024 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

A. Capaian Kinerja Organisasi 29

B. Realisasi Anggaran 56

BAB IV PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Rekomendasi 67

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tahun 2024 ini merupakan pelaporan tahun pertama atas pencapaian kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan tahun 2024 – 2026. Untuk mewujudkan indikator kinerja utama Kepala Daerah, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan telah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai selama 3 tahun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan urusan kebudayaan, seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel IK.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. Meningkatnya APK PAUD	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,98%	94,25%	94,60%
		2. Meningkatnya Lembaga PAUD	2. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga	925 Lembaga	930 Lembaga
		3. Terciptanya PAUD Holistik integratif	3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	150 Lembaga	200 Lembaga	300 Lembaga
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan	4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,40%	95,55%	95,70%
		5. Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapan KKNI	5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga	57 Lembaga	60 Lembaga

iii

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
		6. Meningkatnya APK SD dan SMP 7. Meningkatnya minat sekolah 8. Terciptanya kerjasama dengan masyarakat 9. Terciptanya sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) 10. Terciptanya sekolah sehat 11. Terciptanya sekolah ramah anak	6. APK SD/MI 7. APM SD/MI 8. APK SMP/MTs 9. APM SMP/MTs	100,02% 99,91% 99,52% 93,65%	100,02% 99,92% 99,65% 93,69%	100,03% 99,92% 99,80% 94,05%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Peningkatan mutu tenaga pendidik 2. Peningkatan mutu peserta didik 3. Penurunan angka putus sekolah 4. Terpenuhinya pengebangan potensi minat dan bakat siswa	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B 2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,70% 1,90% 1,80%	37,05% 1,90% 1,80%	37,65% 1,90% 1,80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
			4. Rasio Kelas Layak SD	86,26%	86,86%	87,30%
			5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%	1,90%	1,90%
			6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%	1,80%	1,80%
			7. Rasio Kelas Layak SMP	97,99%	98,08%	98,20%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Secara bertahap seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka 2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan bagi tenaga pendidik 3. Mewujudkan pendidikan berkarakter	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,65%	97,98%
			2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%	85,55%	85,80%
			3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%
			4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan dalam kualitas proses pembelajaran 2. Memudahkan akses belajar 3. Terpenuhinya sumber belajar yang lebih variatif	1. Persentase Guru Layak SD	95,76%	95,90%	96,10%
			2. Rasio Kelas Layak PAUD	73,94%	74,19%	74,50%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
		4. Meningkatnya minat belajar peserta didik				
5.	Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	1. Peningkatan mutu pengawas sekolah 2. Peningkatan mutu kepala sekolah 3. Peningkatan mutu penilik 4. Peningkatan mutu tenaga pendidik	1. Persentase Guru Layak PAUD	74,28%	74,75%	74,94%
			2. Guru Profesional di PAUD	23,50%	23,87%	24,17%
			3. Guru Profesional di SD	59,30%	59,65%	59,90%
			4. Guru Profesional di SMP	59,25%	59,85%	60,05%
			5. Persentase Guru Layak SMP	98,96%	98,98%	98,99%
6	Pemajuan Kebudayaan	1. Peningkatan kompetensi SDM 2. Melakukan rekrutmen pamong budaya 3. Pelestarian situs dan bangunan bersejarah 4. Peningkatan peras serta masyarakat adat dan budaya	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
			2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	143 Buah	143 Buah	143 Buah
			3. Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%
			4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24 Buah	24 Buah	24 Buah
			5. Jumlah Pengunjung Museum	36.690 Orang	38.392 Orang	40,192 Orang

Dalam mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024 yang berisi target dari indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh dinas selama tahun 2024 berdasarkan Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) tahun 2024. Realisasi dari target Perjanjian Kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel IK.2
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,98%	98,05%
		2. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga	933 Lembaga
		3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	150 Lembaga	200 Lembaga
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,40%	96,10%
		5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga	85 Lembaga
		6. APK SD/MI	100,02%	100%
		7. APM SD/MI	99,91%	99,91%
		8. APK SMP/MTs	99,52%	100%
		9. APM SMP/MTs	93,65%	97,50%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B	36,70%	40,70%
		2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,90%	89,09%
		3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,80%	85,31%
		4. Rasio Kelas Layak SD	86,26%	90,27%
		5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%	79,68%
		6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%	75,64%
		7. Rasio Kelas Layak SMP	97,99%	98,08%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,80%
		2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%	92,50%
		3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%
		4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Persentase Guru Layak SD	95,76%	97,74%
		2. Rasio Kelas Layak PAUD	73,94%	87,08%
5.	Peningkatan Profesionalisme,	1. Persentase Guru Layak PAUD	74,28%	76,94%
		2. Guru Profesional di PAUD	23,50%	67,85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
	Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	3. Guru Profesional di SD 4. Guru Profesional di SMP 5. Persentase Guru Layak SMP	59,30% 59,25% 98,96%	71,77% 68,30% 98,98%
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3. Terlestarikannya Cagar Budaya 4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 5. Jumlah Pengunjung Museum	12 Kegiatan 143 Buah 100% 24 Buah 36.690 Orang	12 Kegiatan 143 Buah 100% 24 Buah 40.266 Orang

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan Indikator Kinerja Utama pada sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pengelolaan pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan mengandung pengertian sebagai proses timbal balik antara kepribadian individu dalam penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan yakni perkembangan potensi individu yang terorganisir baik dari segi moral, tingkat intelektual, sikap, keterampilan dan potensi lainnya. Proses pendidikan merupakan sejumlah potensi individu yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dapat disempurnakan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan.

Pendidikan adalah semua aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina sejumlah potensi yang terdapat dalam rohani individu, yang meliputi: citra, cipta, karsa, budi nurani yang luhur, jasmani disertai panca indra, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Lembaga pendidikan turut bertanggungjawab dalam menentukan tujuan, isi sistem dan organisasi pendidikan, keluarga, masyarakat. Pengelolaan lembaga pendidikan merupakan suatu usaha memajukan masyarakat dan memajukan kebudayaan sebagai satu kesatuan dalam mengembangkannya.

Tenaga pembangun merupakan sumber insani yang dapat diperoleh melalui pendidikan, karena pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Jika suatu bangsa tidak mampu membangun sebagai sumber manusia ia tidak akan dapat mengembangkan masyarakat. Apakah itu sistem politik modern, aparat pemerintah yang cakap dan bersih, perekonomian yang makmur dan

membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam arti luas pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia (*Human Invesment Development*) yang berperan dalam menyumbangkan sikap positif terhadap pembangunan.

Pemerintah sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang, semua itu ditujukan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan memerlukan SDM yang berpengetahuan, cakap, trampil dan berdedikasi tinggi sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan :

1. Meningkatkan dan menggerakkan pembangunan secara keseluruhan. Ini merupakan gejala sosial dan gejala budaya agar tenaga-tenaga hasil pendidikan dapat disumbangkan bagi kepentingan dan hajat hidup manusia serta masyarakat itu sendiri.
2. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai perbaikan taraf hidup dan tata kehidupan serta penghidupan yang sesuai dengan persepsi sosio budaya masyarakat itu sendiri.
3. Pendidikan senantiasa menyentuh berbagai taraf hidup dan tata kehidupan serta penghidupan masyarakat.
4. Arah dan prioritas pendidikan pada dasarnya merupakan manifestasi terhadap hasil penalaran dan penilaian dari realitas tenaga pendidik yang dapat dijadikan konteks sosial budaya di dalam wawasan nusantara.

5. Pendidikan pada hakekatnya adalah pembangunan pendidikan secara nasional terhadap insani guna perbaikan taraf hidup dan tata kehidupan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat kompleks, dinamis dan cepat serta penuh ketidakpastian, hal ini dapat menimbulkan persaingan yang ketat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, karena lingkungan hidup dipengaruhi dan dipacu oleh kemajuan teknologi informasi sebagai salah satu implikasi kompleksitas yang dapat mengakibatkan proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit.

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan kemajuan di segala bidang. Salah satu cara untuk mencapai semua itu adalah dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan dengan melibatkan semua unsur baik pemerintah, masyarakat, swasta maupun lembaga/organisasi non pemerintah.

Pendidikan yang berkualitas akan terwujud oleh sekolah yang baik, karena itu sekolah yang bermutu harus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance sehingga pemberdayaan (empowering) yang sedang digalakkan melalui School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah dapat diterapkan di seluruh daerah dengan teratur, tertib dan sukses, serta meningkatkan pelayanan umum yang lebih prima terhadap stake holders

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 tahun 2021, tentang Kedudukan, susunan organisasi ,tugas pokok Fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan di bidang pendidikan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Mempunyai fungsi

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaaan Kebijakan di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2016.

1. Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
   - 2.1. Sub Bagian Umum
   - 2.2. Sub Substansi Keuangan
   - 2.3. Sub Substansi Program
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar:
   - 3.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
   - 3.2. Sub Substansi Kesiswaan Sekolah dasar
   - 3.3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
4. Bidang Pembinaan SMP:
   - 4.1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
   - 4.2. Sub Substansi Keiswaan SMP
   - 4.3. Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana SMP
5. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas :
   - 5.1. Seksi PAUD
   - 5.2. Sub Substansi Dikmas
   - 5.3. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan Dikmas
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan
   - 6.1. Seksi PTK SD
   - 6.2. Seksi PTK SMP

6.3. Seksi PTK PAUD dan Dikmas

7. Bidang Kebudayaan

7.1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman

7.2. Sub Substansi Kesenian,sejarah dan Tradisi

7.3. Sub Substansi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Kebudayaan

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan

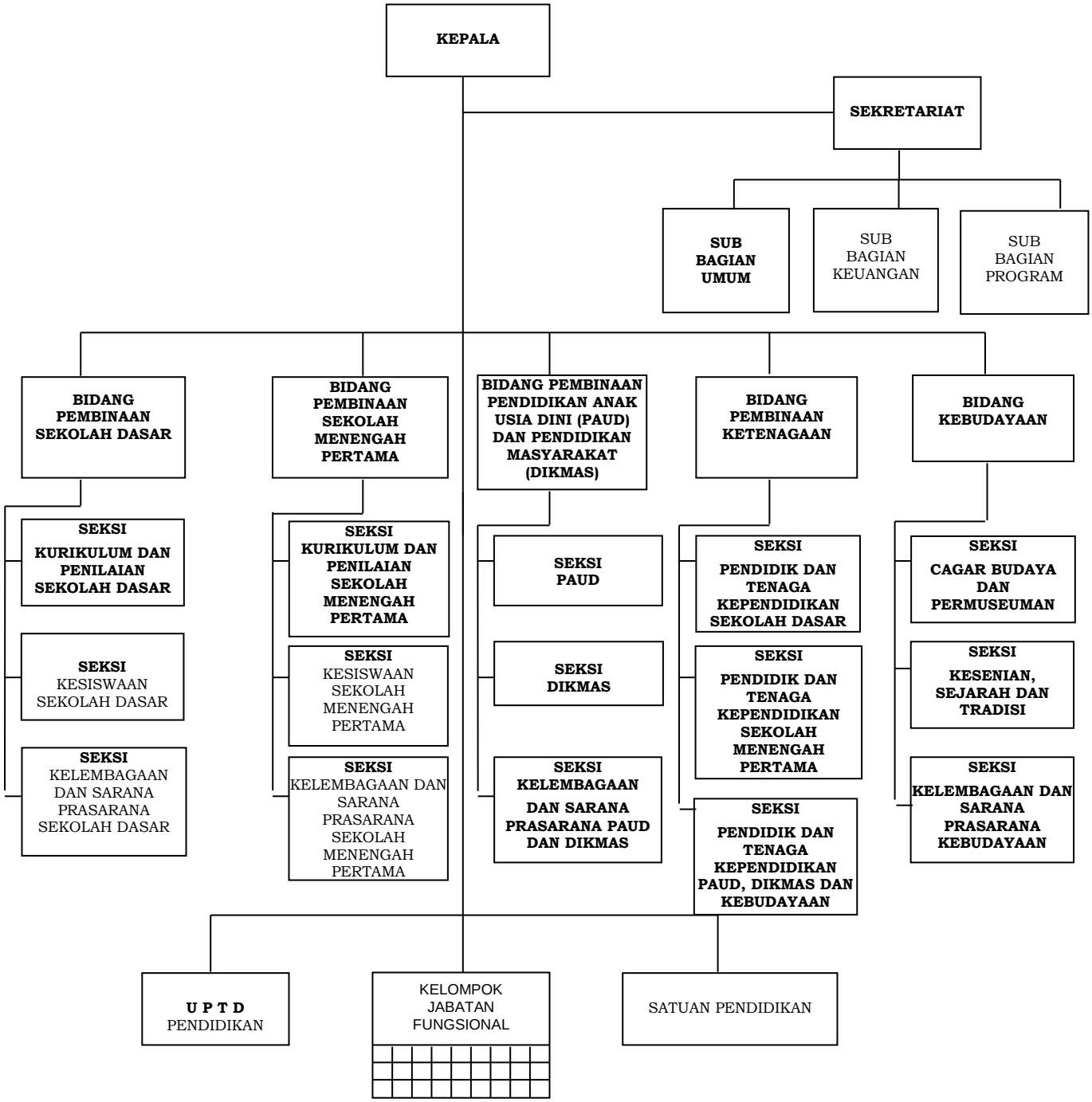

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi dan berperan sebagai penggerak roda organisasi yang dapat menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang harus terus dibina dan dipelihara agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	JENJANG	JUMLAH	STATUS
1	Tenaga Fungsional		
	a. Guru (Tk, SD, SMP)	9.870	ASN
	b. Penilik	76	PNS
	c. Pengawas Sekolah	60	ASN
	d. Pamong Belajar	7	ASN
	e. Analis Kepegawaian	1	ASN
	f. Arsiparis	5	ASN
	g. Pranata Komputer	7	ASN
2	Tenaga Non Fungsional		
	a. Struktural	13	ASN
	b. Pelaksana	405	ASN
	Total	**10.444**	

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	JENJANG	JUMLAH	STATUS
1	Tenaga Fungsional		
	a. Pamong Budaya	8	ASN
2	Tenaga Non Fungsional		
	a. Struktural	1	ASN
	b. Pelaksana	7	ASN
	Total	**16**	

D. Kaitan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Visi Misi Kabupaten Kuningan

Visi Kabupaten Kuningan tahun 2019-2023 adalah ***KUNINGAN MAJU (MAKMUR, AGAMIS, PINUNJUL) BERBASIS DESA TAHUN 2023.*** Sedangkan MISI nya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya dengan Jiwa Kepemimpinan Nu Sajati.
2. Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu Sajati dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara dalam Bingkai Kebangsaan dan Kebhinekaan.
3. Mewujudkan Manajemen Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata, Adil, Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Nu Sajati.
4. Mewujudkan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata, Budaya, dan Potensi Lokal untuk Mempercepat Pertumbuhan serta Pemerataan Ekonomi Rakyat.
5. Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur untuk Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja dalam Lingkungan yang Lestari.

E. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Secara umum penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran 2024 secara berkesinambungan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti diantaranya:

a) Pelaksanaan periodisasi Kepala Sekolah belum dapat berjalan maksimal disemua jenjang pendidikan.

b) Kondisi bangunan ruang kelas khususnya pada jenjang Sekolah Dasar masih terdapat bangunan yang rusak. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui effesiensi penggunaan bantuan yang diterima baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta dengan mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.

b). Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil belum sepenuhnya terpenuhi, langkah-langkah yang dialaksanakan melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah cukup.

c). Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum sepenuhnya mencapai target khususnya dalam pemenuhan sarana prasarana bangunan sekolah , hal tersebut diakibatkan keterbatasan kemampuan daerah didalam pembiyayaan bidang pendidikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 Telah menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan tujuan dan sasaran kepala daerah sebagai berikut.

Tingkat ketercapaian visi melalui misi yang dirinci Tujuan Strategis di atas diukur dengan pencapaian sejumlah sasaran strategis atau sasaran pokok. Sasaran strategis atau sasaran pokok dimaksud menggambarkan kondisi yang hendak dicapai, serta ditetapkan dalam RPJMD, yang telah menetapkan beberapa indikator terukur, berikut tujuan dan sasaran kepala daerah :

1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

Dalam menyelaraskan tujuan dan sasaran Kepala Daerah berdasarkan rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026, maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas (Renstra) tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan
3. Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
4. Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan
5. Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan
6. Pemajuan Kebudayaan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu tiga tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya APK PAUD
2. Meningkatnya Lembaga PAUD
3. Terciptanya PAUD Holistik integratif
4. Angka Partisipasi Anak Usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan
5. Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapan KKNI
6. Meningkatnya APK SD dan SMP
7. Meningkatnya minat sekolah
8. Terciptanya kerjasama dengan masyarakat
9. Terciptanya sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata)
10. Terciptanya sekolah sehat
11. Terciptanya sekolah ramah anak
12. Peningkatan mutu tenaga pendidik
13. Peningkatan mutu peserta didik
14. Penurunan angka putus sekolah
15. Terpenuhinya pengebangan potensi minat dan bakat siswa
16. Secara bertahap seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka
17. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan bagi tenaga pendidik

18. Mewujudkan pendidikan berkarakter
19. Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan dalam kualitas proses pembelajaran
20. Memudahkan akses belajar
21. Terpenuhinya sumber belajar yang lebih variatif
22. Meningkatnya minat belajar peserta didik
23. Peningkatan mutu pengawas sekolah
24. Peningkatan mutu kepala sekolah
25. Peningkatan mutu penilik
26. Peningkatan mutu tenaga pendidik
27. Peningkatan kompetensi SDM
28. Melakukan rekrutmen pamong budaya
29. Pelestarian situs dan bangunan bersejarah
30. Peningkatan peran serta masyarakat adat dan budaya

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. Meningkatnya APK PAUD 2. Meningkatnya Lembaga PAUD 3. Terciptanya PAUD Holistik integratif 4. Angka Partisipasi Anak Usia 7-18	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun 2. Jumlah Lembaga PAUD 3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	93,98% 920 Lembaga 150 Lembaga	94,25% 925 Lembaga 200 Lembaga	94,60% 930 Lembaga 300 Lembaga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
		tahun pendidikan kesetaraan 5. Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapan KKNI 6. Meningkatnya APK SD dan SMP 7. Meningkatnya minat sekolah 8. Terciptanya kerjasama dengan masyarakat 9. Terciptanya sekolah berwawasan lingkungan (adiwiyata) 10. Terciptanya sekolah sehat 11. Terciptanya sekolah ramah anak	4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan 5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI 6. APK SD/MI 7. APM SD/MI 8. APK SMP/MTs 9. APM SMP/MTs	95,40% 55 Lembaga 100,02% 99,91% 99,52% 93,65%	95,55% 57 Lembaga 100,02% 99,92% 99,65% 93,69	95,70% 60 Lembaga 100,03% 99,92% 99,80% 94,05%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Peningkatan mutu tenaga pendidik 2. Peningkatan mutu peserta didik 3. Penurunan angka putus sekolah	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B 2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	36,70% 1,90%	37,05% 1,90%	37,65% 1,90%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
		4. Terpenuhinya pengebangan potensi minat dan bakat siswa	3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,80%	1,80%	1,80%
			4. Rasio Kelas Layak SD	86,26%	86,86%	87,30%
			5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%	1,90%	1,90%
			6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%	1,80%	1,80%
			7. Rasio Kelas Layak SMP	97,99%	98,08%	98,20%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Secara bertahap seluruh sekolah menerapkan kurikulum merdeka	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,65%	97,98%
			2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%	85,55%	85,80%
		2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan bagi tenaga pendidik	3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%
		3. Mewujudkan pendidikan berkarakter	4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan dalam kualitas proses pembelajaran 2. Memudahkan akses belajar 3. Terpenuhinya sumber belajar yang lebih variatif 4. Meningkatnya minat belajar peserta didik	1. Persentase Guru Layak SD 2. Rasio Kelas Layak PAUD	95,76% 73,94%	95,90% 74,19%	96,10% 74,50%
5.	Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	1. Peningkatan mutu pengawas sekolah 2. Peningkatan mutu kepala sekolah 3. Peningkatan mutu penilik 4. Peningkatan mutu tenaga pendidik	1. Persentase Guru Layak PAUD 2. Guru Profesional di PAUD 3. Guru Profesional di SD 4. Guru Profesional di SMP 5. Persentase Guru Layak SMP	74,28% 23,50% 59,30% 59,25% 98,96%	74,75% 23,87% 59,65% 59,85% 98,98%	74,94% 24,17% 59,90% 60,05% 98,995
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Peningkatan kompetensi SDM	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
				2024	2025	2026
		2. Melakukan rekrutmen pamong budaya 3. Pelestarian situs dan bangunan bersejarah 4. Peningkatan peras serta masyarakat adat dan budaya	2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3. Terlestarikannya Cagar Budaya 4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 5. Jumlah Pengunjung Museum	143 Buah 100% 24 Buah 36.690 Orang	143 Buah 100% 24 Buah 38.392 Orang	143 Buah 100% 24 Buah 40,192 Orang

Seluruh Indikator kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan *(reward)* dan sanksi *(punishment).*

Untuk mencapai target sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, maka setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 disusunlah perjanjian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,98%
		2. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga
		3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	150 Lembaga
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,40%
		5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga
		6. APK SD/MI	100,02%
		7. APM SD/MI	99,91%
		8. APK SMP/MTs	99,52%
		9. APM SMP/MTs	93,65%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B	36,70%
		2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,90%
		3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,80%
		4. Rasio Kelas Layak SD	86,26%
		5. .Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target
		6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%
		7. Rasio Kelas Layak SMP	97,99%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%
		2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%
		3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%
		4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Persentase Guru Layak SD	95,76%
		2. Rasio Kelas Layak PAUD	73,94%
5.	Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	1. Persentase Guru Layak PAUD	74,28%
		2. .Guru Profesional di PAUD	23,50%
		3. Guru Profesional di SD	59,30%
		4. Guru Profesional di SMP	59,25%
		5. Persentase Guru Layak SMP	98,96%
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan
		2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	143 Buah
		3. Terlestarikannya Cagar Budaya	100%
		4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24 Buah
		5. Jumlah Pengunjung Museum	36.690 Orang

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, intern Dinas sendiri disusun Perjanjian Kinerja antara esselon III dengan eselon II dan esselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ukuran Indikator Sasaran Strategis yang harus di realisasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	**1.** APK PAUD Usia 5-6 Tahun	Persen	1. Jumlah anak usia 5-6 Tahun di PAUD ……x 100% Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	93,98%	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
		2. Jumlah Lembaga PAUD	Lembaga Lembaga	2. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga	
		3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif		3. Jumlah Lembaga PAUD Terpadu pembina Holistik Integratif	150 Lembaga	
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	Persen	4. Jumlah anak Usia 17-18 tahun …… x 100% Jumlah Anak yang ATS, LTM dan BPB	95,40%	
		5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	Lembaga	5. Jumlah Lembaga Kursus yang menerapkan KKNI	55 Lembaga	
		6. APK SD/MI	Persen	6. Jumlah seluruh siswa SD/MI ……x 100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	100,02%	Kepala Bidang Pembinaan SD
		7. APM SD/MI	Persen	7. Jumlah Anak Usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI ……x100% Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	99,91%	
		8. APK SMP/MTs	Persen	8. Jumlah seluruh siswa SMP/MTs	99,52%	Kepala Bidang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
				……x 100% Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun		Pembinaan SMP
		9. APM SMP/MTs	Persen	9. Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun jenjnag SMP/MTs …… x 100% Jumlah Penduduk usia 13-15 Tahun	93,65%	
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B	Persen	1. Jumlah akreditasi minimal B di PAUD ……x100% Jumlah Sekolah PAUD	36,70%	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
		2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	2. Kemampuan Literasi SD berdasarkan nilai di Rapor Pendidikan	1,90%	Kepala Bidang Pembinaan SD
		3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Persen	3. Kemampuan Literasi SD berdasarkan nilai di Rapor Pendidikan	1,80%	
		4. Rasio Kelas Layak SD	Persen	4. Jumlah Ruang Kelas Baik di SD ……x100% Jumlah Seluruh Ruang Kelas SD	86,26%	
		5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	5. Kemampuan Literasi SMP berdasarkan nilai di Rapor Pendidikan	1,90%	Kepala Bidang Pembinaan SMP
		6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	6. Kemampuan Literasi SMP berdasarkan nilai di Rapor Pendidikan	1,80%	
		7. Rasio Kelas Layak SMP	Persen	7. Jumlah Ruang Kelas Baik di SMP ……x 100% Jumlah Seluruh Ruang Kelas SMP	97,99%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	1. Jumlah Akreditasi sekolah minimal B di SD .....x100 % Jumlah seluruh sekolah di SD	97,60%	Kepala Bidang Pembinaan SD
		2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	2. Jumlah Akreditasi Sekolah Minimal B di SMP .....x100% Jumlah seluruh sekolah di SMP	85,10%	Kepala Bidang Pembinaan SMP
		3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	Persen	3. Jumlah Pengawas di SD dan SMP yang sudah sertifikasi	100%	Kepala Bidang Pembinaan
		4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	Persen	4. Jumlah Kepala Sekolah di SD, SMP yang sudah sertifikasi	100%	Ketenagaan
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Persentase Guru Layak SD	Persen	1. Jumlah Guru SD yang Berpendidikan minimal S1/D4 .....x100% Jumlah seluruh guru SD	95,76%	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
		2. Rasio Kelas Layak PAUD	Persen	2. Jumlah Ruang Kelas Baik di PAUD .....x100% Jumlah total ruang kelas PAUD	73,94%	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
5.	Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	1. Persentase Guru Layak PAUD	Persen	1. Jumlah guru yang berpendidikan minimal S1/D4 .....x100% Jumlah seluruh guru	74,28%	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas
		2. Guru Profesional di PAUD	Persen	2. Jumlah guru TK yang sudah berserifikasi .....x100% Jumlah seluruh guru TK	23,50%	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
		3. Guru Profesional di SD	Persen	3. Jumlah guru SD yang sudah bersertifikasi .....x100% Jumlah seluruh Guru SD	59,30%	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi	Target Kinerja Sasaran	Unit Kerja Penanggung Jawab
		4. Guru Profesional di SMP	Persen	4. Jumlah Guru SMP yang sudah bersertifikasi .....x100% Jumlah seluruh Guru SMP	59,25%	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
		5. Persentase Guru Layak SMP	Persen	5. Jumlah guru yang berpendidikan minimal S1/D4 .....x100% Jumlah seluruh guru di SMP	98,96%	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3. Terlestarikannya Cagar Budaya 4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 5. Jumlah Pengunjung Museum	Kegiatan Buah Persen Buah Orang	1. Jumlah Kegiatan tentang penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 3. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 4. Jumlah Karua Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi 5. Jumlah Pengunjung Museum	12 Kegiatan 143 Buah 100% 24 Buah 36.690 Orang	Kepala Bidang Kebudayaan

D. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2
1.01.2.22.0.00.01.00	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2.22.02.2.01.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2.22.02.2.02.01	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional
2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2.22.02.2.03.01	Perlindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2.22.03 **2.22.03.2.01**	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional** **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya
2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja pada tahun 2024 pada masing masing indikator kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,98%	98,05%
		2. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga	933 Lembaga
		3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	150 Lembaga	200 Lembaga
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,40%	96,10%
		5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga	85 Lembaga

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
		6. APK SD/MI	100,02%	100,00%
		7. APM SD/MI	99,91%	99,91%
		8. APK SMP/MTs	99,52%	100,00%
		9. APM SMP/MTs	93,65%	97,50%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B	36,70%	40,70%
		2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,90%	89,09%
		3. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,80%	85,31%
		4. Rasio Kelas Layak SD	86,26%	90,27%
		5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%	79,68%
		6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%	75,64%
		7. Rasio Kelas Layak SMP	97,99%	98,08%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,80%
		2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%	92,50%
		3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%
		4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Persentase Guru Layak SD	95,76%	97,74%
		2. Rasio Kelas Layak PAUD	73,94%	87,08%
5.	Peningkatan Profesionalisme,	1. Persentase Guru Layak PAUD	74,28%	76,94%
		2. Guru Profesional di PAUD	23,50%	67,85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
	Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	3. Guru Profesional di SD 4. Guru Profesional di SMP 5. Persentase Guru Layak SMP	59,30% 59,25% 98,96%	71,77% 68,30% 98,98%
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 3. Terlestarikannya Cagar Budaya 4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 5. Jumlah Pengunjung Museum	12 Kegiatan 143 Buah 100% 24 Buah 36.690 Orang	12 Kegiatan 143 Buah 100% 24 Buah 40.266 Orang

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2024 merupakan pencapaian tahun pertama Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026. Untuk perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya hanya bisa dilihat pada beberapa indikator sasaran saja mengingat ada perbedaan antara sasaran dan indikator sasaran namun ada juga yang selaras sehingga bisa dibandingkan terkait capaian tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
1.	Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan	1. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,58%	93,98%	93,98%	98,05%
		2. Jumlah Lembaga PAUD	910 Lembaga	920 Lembaga	920 Lembaga	933 Lembaga
		3. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	100 Lembaga	150 Lembaga	150 Lembaga	200 Lembaga
		4. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,15%	95,40%	95,40%	96,10%
		5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	85 Lembaga
		6. APK SD/MI	100,00%	100,02%	100,00%	100,00%
		7. APM SD/MI	99,90%	99,91%	99,91%	99,91%
		8. APK SMP/MTs	99,35%	99,52%	99,52%	100,00%
		9. APM SMP/MTs	93,25	93,65%	93,65%	97,50%
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	1. Persentase PAUD berakreditasi minimal B	0	36,70%	36,70%	40,70%
		2. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,81%	1,90%	1,90%	89,09%
		3. Rata-rata kemampuan	1,70%	1,80%	1,80%	85,31%

		Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional				
		4. Rasio Kelas Layak SD	85,66%	86,26%	86,26%	90,27%
		5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,84%	1,90%	1,90%	79,68%
		6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,73%	1,80%	1,80%	75,64%
		7. Rasio Kelas Layak SMP	97,95	97,99%	97,99%	98,08%
3.	Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	1. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,60%	97,60%	97,80%
		2. Persentase SMP berakreditasi minimal B	84,82%	85,10%	85,10%	92,50%
		3. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%	100%
4.	Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	1. Persentase Guru Layak SD	95,56%	95,76%	95,76%	97,74%
		2. Rasio Kelas Layak PAUD	73,69%	73,94%	73,94%	87,08%
5.	Peningkatan Profesionalis	1. Persentase Guru Layak PAUD	74,08%	74,28%	74,28%	76,94%

	me, Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan	2. Guru Profesional di PAUD	23,37%	23,50%	23,50%	67,85%
		3. Guru Profesional di SD	59,08%	59,30%	59,30%	71,77%
		4. Guru Profesional di SMP	58,98%	59,25%	59,25%	68,30%
		5. Persentase Guru Layak SMP	98,92%	98,96%	98,96%	98,98%
6.	Pemajuan Kebudayaan	1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
		2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	143 Buah	143 Buah	143 Buah	143 Buah
		3. Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%
		4. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24 Buah	24 Buah	24 Buah	24 Buah
		5. Jumlah Pengunjung Museum	34.489 Orang	36.690 Orang	36.690 Orang	40.266 Orang

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2024 dengan target jangka menengah

	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN S.D 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
1	APK Paud usia 5-6 tahun	98,05%	94,60 %	100%
2	Jumlah Lembaga PAUD	933 Lembaga	930 Lembaga	100%
3	Jumlah PAUD Holistik integratif	200 Lembaga	300 Lembaga	100%
4	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	40,70%	37,65 %	100%
5	Angka Partisipasi Anak usia 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	96,10%	95,70 %	100%
6	Jumlah Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapan KKNI	85 Lembaga	60 Lembaga	100%
7	APK SD/MI/Paket A	100,00%	100,03 %	100%
8	APM SD/MI/Paket A	99,91%	99,92 %	100%
9	APK SMP/MTs/ Paket B	100,00%	99,80 %	100%
10	APM SMP/MTs/Paket B	97,50%	94,05 %	100%
11	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	89,09%	1,90 %	100%
12	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	85,31%	1,80 %	100%
13	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	79,68%	1,90 %	100%
14	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	75,64%	1,80 %	100%
15	Persentase SD berakreditasi minimal B	97,80%	97,98 %	100%
16	Persentase SMP berakreditasi minimal B	92,50%	85,80 %	100%
17	Guru PAUD Profesional	67,85%	24,17 %	100%
18	Guru SD Profesional	71,77%	59,90 %	100%
19	Guru SMP Profesional	68,30%	60,05 %	100%
20	Persentase Kepala Sekolah Profesional SD dan SMP	100%	100 %	100%
21	Persentase pengawas profesional SD dan SMP	100%	100 %	100%
22	Persentase Guru Layak PAUD	76,94%	74,94 %	100%
23	Persentase Guru Layak SD	97,74%	96,10 %	100%
24	Persentase Guru Layak SMP	98,98%	98,99 %	100%

25	Rasio Kelas Layak PAUD	87,08%	74,50 %	100%
26	Rasio Kelas Layak SD	90,27%	87,30 %	100%
27	Rasio Kelas Layak SMP	98,08%	98,20 %	100%
28	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
29	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	143 Buah	143 Buah	100%
30	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100 %	100%
31	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24 Karya Budaya	24 Karya Budaya	100%
32	Jumlah Pengunjung Museum	40.266 Orang	40.192 Orang	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada 32 indikator kinerja sudah menunjukan progres yang cukup baik pada pelaksanaan Renstra 2024-2026 ini, hampir seluruh indikator kinerja telah menunjukan pencapaian, bahkan ada satu indikator telah mencapai target atau melebih target jangka menengah.

1. Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, yaitu kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) pada jenjang pendidikan PAUD di tingkat Nasional , Provinsi, serta Kabupaten/ Kota.

APK PAUD tahun 2023 sebesar 93,70 Mereka bersekolah pada layanan PAUD, seperti:

1. Taman Kanak-Kanak
2. RA
3. Kelompok Bermain
4. Taman Penitipan Anak
5. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Dalam rangka memenuhi target pada 2030, seluruh anak memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan pra sekolah dasar tersebut untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Permasalahan:

- Terbatasnya sarana, prasarana, dan fasilitas yang tersedia di lembaga layanan PAUD.
- PAUD yang ada belum sesuai dengan standar.
- Terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan, bahkan umumnya belum memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan yang memadai.
- Belum semua desa di daerah perbatasan memiliki layanan PAUD.
- Terbatasnya dukungan dana (APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat) untuk mendukung perluasan layanan PAUD di daerah perbatasan.
- Terbatasnya sosialisasi pentingnya layanan PAUD berkualitas pada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.

2. Jumlah lembaga PAUD

Dunia PAUD semakin hari semakin mendapat perhatian yang serius dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Salah satu bentuk perhatian dari pemerintah adalah adanya BOP (Bantuan Operasional

Pendidikan) yang sekarang ini sudah dirasakan manfaatnya oleh lembaga PAUD.

Sebagai upaya menjamin mutu dan layanan PAUD, pemerintah menyelenggarakan program akreditasi lembaga PAUD yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNFI.

3. Minimal setiap kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistic integrative sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik di Satuan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) untuk

mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan

4. Angka Partisipasi anak usia 7-18 tahun pendidikan kesetaraan

Dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang putus sekolah. Dalam setiap program yang akan diselenggarakan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya partisipasi masyarakat tersebut maka setiap program yang akan dijalankan akan sia-sia.

5. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah Menetapkan KKNI

Keberadaan kerangka kualifikasi secara nasional diharapkan akan mendorong pengembangan keterampilan para pekerja, memfasilitasi mobilitas peserta didik dan tenaga kerja, dan akan meningkatkan akses seseorang untuk mengikuti jenjang pendidikan serta pelatihan lebih tinggi sepanjang hidupnya. Kesetaraan sistem kualifikasi antar negara peserta konvensi akan memberikan mobilitas yang lebih luas, menciptakan pengakuan kesetaraan internasional terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, serta akan mempermudah pertukaran pelajar, mahasiswa atau pakar.

6. APK (Angka Partisipasi Kasar) SD

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan

indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk meningkatkan APK yang belum mencapai target, maka beberapa hal perlu diperhatikan, seperti: fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

7. APM (Angka Partisipasi Murni) SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah siswa usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun. APM menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

8. APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMP dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun. APK menunjukan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Untuk meningkatkan APK yang belum mencapai target, maka beberapa hal perlu diperhatikan, seperti: fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik

serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat.

9. APM (Angka Partisipasi Murni) SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah siswa usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

10. Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Asesmen Literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas Individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

11. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

12. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

Asesmen Literasi bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai

jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas Individu sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

13. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

    Dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

14. Persentase PAUD berakreditasi minimal B

    Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

    Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu suatu institusi oleh tim ahli (yang disebut asesor) yang berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan.

15. Persentase SD berakreditasi minimal B

    Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu.

    Akreditasi merupakan proses penilaian atau evaluasi mutu suatu institusi oleh tim ahli (yang disebut asesor) yang berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan.

16. Persentase SMP berakreditasi minimal B

Akreditasi dilakukan atas instruksi dari badan independen di luar institusi yang hasilnya berupa pengakuan terhadap suatu institusi telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Akreditasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk menetukan apakah sebuah institusi layak beroperasi ataukah tidak.

17. Jumlah Guru PAUD Profesional

Untuk mendapatkan hasil pembentukan anak yang berkualitas salah satunya didukung oleh guru yang profesional. Guru PAUD merupakan pendidik profesional dengan utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi dan memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang perkembangan anak.

18. Jumlah Guru Profesional di SD

Guru adalah faktor utama dalam mewujudkan kesuksesan pendidikan. Tanpa keterlibatan aktif dari guru pendidikan akan merosot tajam. Oleh karena itu idealnya guru harus profesional dan memiliki kompetensi seperti pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

19. Jumlah Guru Profesional di SMP

Profesionalisme dan profesionalisasi pendidik memiliki arti penting yang relevan dalam pendidikan karena mempengaruhi peran pendidik dan pedagoginya, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar secara efektif.

20. Jumlah Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP

Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan setiap tugasnya, banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan

merupakan faktor terpenting dalam menunjang tercapainya tujuan institusi sekolah.

Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola kantor, sarana dan prasarana sekolah, membina guru, serta mengelola kegiatan sekolah, banyak ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Apabila kepala sekolah mampu membimbing, menggerakkan, dan mengarahkan anggota secara tepat,
maka segala kegiatan yang ada dalam sekolah akan bisa terlaksana secara efektif. Sebaliknya bila tidak, maka tidak akan bisa mencapai tujuan sekolah secara optimal.

21. Jumlah Pengawas Profesional di SD dan SMP

Guna menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan, peranan Pengawas Pendidikan menjadi sangat penting karena untuk mengontrol, menilai dan mengevaluasi jalannya proses pendidikan menjadi tugas dan wewenang pengawas. Dengan demikian pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan untuk menjadikan sekolah lebih maju dan bermutu.

22. Persentase Guru Layak PAUD

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya pemberian bimbingan, pengasuhan, dan stimulasi yang dapat menghasilkan kemampuan dan keterampilan bagi anak. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, sedangkan usia TK adalah anak usia 4 sampai 6 tahun.

Pendidik merupakan penentu dan contoh bagi anak agar anak menjadi generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta

mempu menguasai iptek dan seni. Pendidik dituntut untuk selalu tampil profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengajar dan memberikan pengarahan serta mengevaluasi perkembangan anak.

Agar menjadi seorang pendidik yang profesional, maka seorang guru harus bisa merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, membimbing dan mengabdi pada masyarakat. pendidik merupakan unsur terpenting dalam proses pendidikan, sehingga menghasilkan pendidikan yang beretika dengan terpenuhinya akuntabilitas yang tinggi dalam penerapannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam berbagai bidang seperti intelektual, spiritual, etika, moral maupun fisik motorik anak.

Agar menjadi tenaga pendidik yang profesional maka guru diwajibkan untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

23. Persentase Guru Layak SD

Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, mengatakan bahwa peran dan kedudukan guru yang strategis yaitu mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan.

Pembangunan tersebut berupa upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk mewujudkan terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan prinsip-

prinsip profesionalitas dalam rangka memenuhi hak-hak bagi setiap warga negara dalam mendapatkan binaan pendidikan yang bermutu.

24. Persentase Guru Layak SMP

Guru memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik diberbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang proporsional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Guru layak SMP sangat memengaruhi perkembangan dan pola piker peserta didik. Usia SMP adalah tahapan menuju dewasa dan lebih serius lagi di jenjang SMA. Untuk itu, sudah pasti kelayakan guru di jenjang SMP akan sangat mendukung peserta didik menghadapi fase tersebut.

25. Rasio Kelas Layak PAUD

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 14 menyebutkan bahawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam rangka penyelenggaraan lembaga PAUD pada berbagai jenis dan jalur pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 28

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Selanjutnya, penjelasan tentang prasarana yang dibutuhkan suatu lembaga pendidikan ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut dalam Permendiknas 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD telah disebutkan mengenai prinsip dan persyaratan prasarana yang wajib dimiliki sebuah lembaga PAUD.

26. Rasio Kelas Layak SD

Kondisi Ruang kelas merupakan factor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tingkat kenyamanan pembelajaran di kelas adalah kunci dalam keberhasilan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru baik itu melalui alat, metode pembelajaran yang akan digunakan.

27. Rasio Kelas Layak SMP

Fasilitas sekolah masih termasuk salah satu aspek yang perlu diperhatikan di lembaga pendidikan di Indonesia. Di beberapa sekolah tertentu, fasilitas sekolah masih belum ikut berkembang dengan

kemajuan teknologi, bahkan di pedesaan masih banyak fasilitas sekolah yang jauh dari kata layak.

Padahal, fasilitas sekolah peranannya sangat penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM). Fasilitas sekolah yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh semua pihak yang ada di sekolah, baik guru, murid, kepala sekolah, maupun TU. Jadi bukan hanya untuk guru dan murid saja, fasilitas sekolah bisa berpengaruh terhadap kualitas sekolah dan pembelajaran. Prasarana adalah alat yang secara tidak langsung membantu untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, seperti lokasi, gedung sekolah, lapangan olahraga, uang dan lain-lain.

Sementara sarana artinya alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya; papan tulis, buku, laboratorium, perpustakaan dan lain-lain.

28. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Setiap festival memiliki karakteristik yang unik, sehingga satu festival tidak dapat dijadikan tolak ukur dan model standar yang dapat digunakan untuk mengelola semua jenis festival. Pasalnya, pembentukan festival budaya berasal dari ide kreatif pengelolanya.

Festival budaya juga memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu ada yang bertujuan untuk hiburan dan edukasi, menyatukan berbagai komunitas di dalam masyarakat, serta bertujuan untuk promosi usaha.

- Memberikan kesempatan untuk ibadah keagamaan atau pertunjukan bagi masyarakat.

- Ekspresi identitas kelompok melalui persembahan kepada leluhur, pertunjukan kemampuan dan bakat yang bernilai tinggi, atau mengartikulasikan warisan budaya suatu kelompok.

29. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan kepentingan nasional.

30. Terlestarikannnya Cagar Budaya

Semua bentuk cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kategori yang masuk kedalam cagar budaya itu adalah benda yang berwujud nyata, dapat dilihat dan diraba oleh indera, mempunyai massa dan dimensi yang nyata. Misalnya batu prasasti, candi, nisan makam, dan lain-lain. Selain itu, ada yang namanya warisan budaya yang bersifat ketidakbendaan seperti bahasa, tarian dan sebagainya. Tetapi yang bersifat ketidakbendaan ini tidak termasuk pada kategori cagar budaya. Ada lima kategori atau jenis benda-benda yang masuk kategori sebagai cagar budaya, yaitu benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.

31. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

Karya budaya adalah sesuatu yang muncul akibat beberapa faktor, dari letak geografis, kebutuhan, hingga kepercayaan. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali

suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Inventarisasi pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas;) pencatat- an atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya.

32. Jumlah Pengunjung ke Cagar Budaya

Banyaknya jumlah pengunjung ke Cagar Budaya menunjukan antusiasme masyarakat baik dari dalam atau luar daerah tersebut. Sudah menjadi tugas pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu mempromosikan kekayaan cagar budaya yang dimiliki.

Tabel 3.4

Pencapaian Sasaran Peningkatan Aksebilitas Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Peningkatan Aksebilitas Pendidikan	a. APK PAUD Usia 5-6 Tahun	93,98%	98,05%	100%
	b. Jumlah Lembaga PAUD	920 Lembaga	933 Lembaga	100%

	c. Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif	150 Lembaga	200 Lembaga	100%
	d. Angka Partisipasi Anak Usia 17-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	95,40%	96,10%	100%
	e. Jumlah Program Kursus dan Pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55 Lembaga	85 Lembaga	100%
	f. APK SD/MI	100,00%	100,00%	100%
	g. APM SD/MI	99,91%	99,91%	100%
	h. APK SMP/MTs	99,52%	100,00%	100%
	i. APM SMP/MTs	93,65%	97,50%	100%
	Target Sasaran	**100%**		

Tabel 3.5

Pencapaian Sasaran Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**2024**		**Capaian Kinerja**
		Target	**Realisasi**	
Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	36,70%	40,70%	100%

	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,90%	89,09%	100%
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,80%	85,31%	100%
	Rasio Kelas Layak SD	86,26%	90,27%	100%
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,90%	79,68%	100%
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,80%	75,64%	100%
	Rasio Kelas Layak SMP	97,99%	98,08%	100%
	Target sasaran	**100%**		

Tabel 3.6

Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**2024**		**Capaian Kinerja**
		Target	**Realisasi**	
Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)	a. Persentase SD berakreditasi minimal B	97,60%	97,80%	100%
	b. Persentase SMP berakreditasi minimal B	85,10%	92,50%	100%

	c. Persentase pengawas profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%
	d. Persentase Kepala Sekolah Profesional di SD dan SMP	100%	100%	100%
	Target Sasaran	**100%**		

Tabel 3.7

Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Pemanfaatan Teknologi Sektor Pendidikan	a. Persentase Guru Layak SD	95,76%	97,74%	100%
	b. Rasio Kelas Layak PAUD	73,94%	87,08%	100%
	Target Sasaran	**100%**		

Target 3.8

Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sasaran	Indikator Kinerja	2024		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	
Peningkatan Profesionalisme, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase Guru Layak PAUD	74,28%	76,94%	100%
	b. Guru Profesional di PAUD	23,50%	67,85%	100%
	c. Guru Profesional di SD	59,30%	71,77%	100%

	d. Guru Profesional di SMP nasional	59,25%	68,30%	100%
	e. Persentase Guru Layak SMP	98,96%	98,98%	100%
	Target Sasaran	**100%**		

Target 3.9
Pemajuan Kebudayaan

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**2024**		**Capaian Kinerja**
		Target	**Realisasi**	
Pemajuan Kebudayaan	a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
	b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	143 Buah	143 Buah	100%
	c. Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%
	d. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	24 Buah	24 Buah	100%
	e. Jumlah Pengunjung Museum	36.690 Orang	40.266 Orang	100%
	Target Sasaran	**100%**		

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan tahun 2024 menunjukkan semua indikator sasaran tingkat capaian kinerjanya mencapai 100 % melampaui target kinerja. Ini disebabkan bahwa perencanaan dinas sudah sesuai dengan prediksi di lapangan serta adanya perubahan paradigma pegawai pada umumnya dari berorientasi anggaran menjadi berorientasi kinerja, upaya perbaikan terus menerus dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi berkala progress pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan semakin peduli serta tertibnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengadminisitrasian kegiatan dan pengumpulan data.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu cara untuk bisa melihat keefektifan penggunaan sumberdaya terutama dalam hal penggunaan keuangan bisa dilihat dari realisasi jumlah anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2024, pagu anggaran dinas sebesar Rp. 1.163.958.107.459,00 terrealisasi sebesar Rp. 995.994.074.725,00 atau sebesar 85,27% adapun sisa anggaran 172.079.224,00 dikarenakan adanya efisensi anggaran, secara keseluruhan untuk persentase keberhasilan sudah diatas 80 persen dari total penyerapan anggaran, akan tetapi hal tersebut disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pada tahun 2024 masih terdapat Rasionalisasi anggaran dan tunda bayar untuk beberapa kegiatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja yang di capai bisa terlihat di bidang mana saja yang menjadi pendorong keberhasilan pelayanan dinas berbasis kinerja yaitu pada bidang pembinaan PAUD dan Dikmas, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang pembinaan

Ketenagaan dan bidang Kebudayaan, namun secara keseluruhan semua bidang sudah mencapai target yang direncanakan namun ada juga indikator yang melebihi target.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan, melaksanakan urusan wajib bidang pendidikan dan urusan wajib bidang pengembangan Kebudayaan. Pada tahun anggaran 2024 beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan non urusan dan urusan.

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2			
1.01.2.22.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	**1.168.073.336.949**	**995.994.074.725**	**85,27**
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**862.542.024.960,00**	**803.464.559.945,00**	**93,15**
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**999.050.000**	**551.550.000**	**55,21**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.050.000	14.050.000	100,00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	635.000.000	460.000.000	72,44
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	77.500.000	22,14

1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**849.774.501.779**	**791.468.140.945**	**93,14**
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	849.019.501.779	790.713.140.945	93,13
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	755.000.000	755.000.000	100,00
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**200.000.000**	**200.000.000**	**100,00**
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000.000	200.000.000	100,00
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.449.767.000**	**1.213.144.601**	**83,68**
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	100.000.000	100,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.747.000	249.659.601	83,29
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000	99.950.000	66,63
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.020.000	213.685.000	85,47
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	350.000.000	350.000.000	100,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	100.000.000	66,67
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	99.850.000	66,57
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100.000.000**	**99.550.000**	**99,55**

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	99.550.000	99,55
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.906.306.181**	**9.820.374.399**	**99,13**
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	66.674.399	44,45
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.200.000	92.800.000	99,57
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.663.106.181	9.660.900.000	99,98
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**112.400.000**	**111.800.000**	**99,47**
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.200.000	55.800.000	99,29
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.200.000	56.000.000	99,64
1.01.02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**302.577.859.989**	**189.921.526.583**	**62,77**
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**181.571.766.167**	**127.536.771.483**	**70,24**

1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	91.533.419	91.533.419	100,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	150.000.000	139.115.485	92,74
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.219.119.222	1.287.405.827	58,01
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000	91.525.500	91,53
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	196.266.283	187.586.325	95,58
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	150.000.000	149.325.558	99,55
1.01.02.2.01.22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	20.750.000.000	20.695.500.000	99,74
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000	400.000.000	100,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	207.000.000	206.800.000	99,90
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.000.000	100.000.000	100,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	94.880.044.400	42.296.861.399	44,58
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	-	-
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	62.127.802.843	61.891.117.970	99,62

1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**70.510.858.822**	**43.955.633.709**	**62,34**
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.074.749.822	518.473.653	48,24
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.661.749.000	21.639.499.000	99,90
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	100.000.000	-	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.100.000.000	2.099.900.000	100,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000	100.000.000	100,00
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	220.600.000	88,24
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50.000.000	50.000.000	100,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.000.000	50.000.000	100,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.999.360.000	19.227.161.056	42,73
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	125.000.000	50.000.000	40,00

1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**31.100.458.000**	**7.398.794.391**	**23,79**
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	92.578.000	87.224.391	94,22
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.861.570.000	3.861.570.000	100,00
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	150.000.000	50.000.000	33,33
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	200.000.000	200.000.000	100,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.600.000.000	2.500.000.000	69,44
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	700.000.000	700.000.000	100,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.296.310.000	-	-
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	-	-
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**19.394.777.000**	**11.030.327.000**	56,87
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.266.617.000	1.253.747.000	98,98
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	300.000.000	300.000.000	100,00

	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.490.000.000	2.021.790.000	81,20
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.238.160.000	7.354.790.000	48,27
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100,00
1.01.04	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**100.000.000**	**100.000.000**	100,00
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100.000.000**	**100.000.000**	100,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00

2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**2.853.452.000**	**2.507.988.197**	87,89
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**478.452.000**	**378.452.000**	79,10
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100.000.000**	**100.000.000**	100,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	50.000.000	50.000.000	100,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50.000.000	50.000.000	100,00
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**378.452.000**	**278.452.000**	73,58
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	25.000.000	25.000.000	100,00
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	353.452.000	253.452.000	71,71
2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**875.000.000**	**824.098.600**	94,18

2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**875.000.000**	**824.098.600**	94,18
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	125.000.000	125.000.000	100,00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	750.000.000	699.098.600	93,21
2.22.04	**Program Pembinaan Sejarah**	**25.000.000**	**25.000.000**	100,00
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	**25.000.000**	100,00
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	25.000.000	25.000.000	100,00
2.22.05	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**700.000.000**	**555.437.597**	79,35
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**150.000.000**	100,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	150.000.000	150.000.000	100,00
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**550.000.000**	**405.437.597**	73,72
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	50.000.000	50.000.000	100,00

2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	450.000.000	305.437.597	67,88
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	50.000.000	50.000.000	100,00
				#DIV/0!
2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**775.000.000**	**725.000.000**	93,55
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**775.000.000**	**725.000.000**	93,55
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	25.000.000	25.000.000	100,00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	50.000.000	-	-
2.22.06.2.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	700.000.000	700.000.000	100,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan telah terlaksana dengan baik dengan realisasi keuangan rata-rata diatas 90 %.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Arah kebijakan pendidikan Kabupaten Kuningan ditetapkan melalui:

1. Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu
2. Peningkatan mutu pembelajaran dan lembaga pendidikan
3. Pemberdayaan kapasitas dan manajemen sekolah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan akan melakukan segala upaya agar bisa menjadi instansi yang lebih baik. Sebagai wujud upaya penguatan kinerja dan akuntabilitasnya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Indikator Sasaran yang di dalamnya termasuk Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Indikator Sasaran tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara menyeluruh, sedangkan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan menjalankan tugas, peran dan fungsinya sebagian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Capaian Indikator Kinerja Utama ini akan memberi gambaran sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencapai kinerja sesuai tugas yang diembannya.

B. Rekomendasi

1. Peningkatan Kualitas Guru

Guru memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, guru harus mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan berinovasi. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Mengikuti Penataran

b. Menguatkan fungsi KKG, MKKS dan MGMP

c. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

2. Peningkatan sarana prasarana pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki fasilitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

3. Pengawasan

Setiap yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan urusan pendidikan, tentunya harus terus diawasi bersama agar tercapai tujuan pendidikan di Kabupaten Kuningan.

Kuningan, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

U.KUSMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 006